



Buletin Parlementaria

Nomor 1205/V/VI/2022 • Juni 2022



Lewat RUU KIA, DPR Inisiasi Cuti 40 Hari bagi Suami yang Istrinya Melahirkan



3 Puan Maharani:
Presiden yang Akan
Datang Harus Teruskan
Pembangunan IKN
Nusantara



4 Sufmi Dasco
Terima Kunjungan
Dubes dan Ulama
Federasi Rusia



9 772614 339005

Lewat RUU KIA, DPR Inisiasi Cuti 40 Hari Bagi Suami yang Istrinya Melahirkan

DPR RI menginisiasi cuti selama 40 hari bagi suami yang istrinya melahirkan dalam Rancangan

Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa RUU KIA menguatkan hak para suami untuk dapat mendampingi istrinya yang melahirkan atau mengalami keguguran. Usulan tersebut juga selaras dengan usulan sebelumnya terkait penambahan waktu cuti melahirkan bagi ibu bekerja, dengan total cuti selama 6 bulan.

“DPR RI menyoroti bahwa saat ini kesadaran para ayah semakin tinggi untuk turut serta dalam tugas pengasuhan anak. Maka lewat RUU KIA, kita akan dorong adanya cuti ayah. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak melindungi hak suami dalam mendampingi istrinya saat melahirkan dan selama 40 hari pertama sebagai orangtua baru.” kata Willy dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Senin (20/6).

Usulan terkait cuti pendampingan bagi suami tertuang dalam pasal 6 draf RUU KIA yang menyatakan bahwa suami berhak mendapatkan cuti pendampingan ibu melahirkan paling lama 40 hari atau ibu yang mengalami keguguran paling lama 7 hari. Lewat aturan yang masih akan dibahas itu, menurut Willy, DPR ingin mengembalikan

keutamaan kemanusiaan dan keluarga di mana perawatan generasi Indonesia untuk masa depan menjadi hal penting penggerak kemanusiaan.

“Satu hal yang mau saya tegaskan kembali, saat ini kapitalisme telah menggiring anggota keluarga keluar dari rumah untuk menjadi bahan bakar berjalannya sistem dengan masuk ke pabrik dan industrialisasi. Maka itu, DPR mendorong perusahaan untuk mulai memikirkan *paternity leave* atau cuti melahirkan untuk karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan

sebagai upaya dalam mengembalikan keutamaan kemanusiaan dan keluarga itu,” lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI tersebut.

Willy menyebut, RUU KIA dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Rancangan beleid ini juga menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, RUU KIA menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satunya lewat pemenuhan hak dasar orangtua, khususnya ibu, termasuk hak cuti yang memadai bagi orang tua bekerja. ■ uc/sf

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya. Foto: Dev/rml



Puan Maharani: Presiden yang Akan Datang Harus Teruskan Pembangunan IKN Nusantara



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan IKN Nusantara. Foto: Ist/nvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (22/6). Puan bersama Jokowi dan sejumlah menteri melihat perkembangan proyek pembangunan ibu kota negara baru tersebut. Kunjungan kerja Jokowi bersama Puan turut mengajak sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional.

Puan menyatakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah menegaskan pembangunan ibu kota negara baru harus dilaksanakan hingga tahun 2045. “UU IKN sudah disahkan di DPR artinya sudah ada panduan hukum (presiden yang akan datang) harus meneruskan atau melanjutkan IKN ke depan,” kata Puan.

Tak hanya itu, UU IKN juga sudah mengatur pembangunan ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara secara *multiyears* sebab diprediksi megaproyek itu akan memakan waktu selama 23 tahun.

Puan menyebut, masalah anggaran pembangunan IKN Nusantara pun sudah dipersiapkan dengan matang. “Anggaran sudah disiapkan di APBN bahwa kegiatan ini akan dilakukan *multiyears*. Maka DPR sudah berkoordinasi melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Kementerian Keuangan untuk nantinya itu bisa merealisasikannya,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Sehingga ketika ada pergantian tampuk kepresidenan, Insya Allah IKN masih tetap bisa berjalan sambil menunggu presiden yang akan dilantik,” imbuh politisi PDI-Perjuangan tersebut.

■ sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Wiryanan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimhani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnariha Firsta Dysie, Baggys Maeshyntha, Anju Alfonce Sitomput, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciiani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Christa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Sufmi Dasco Terima Kunjungan Dubes dan Ulama Federasi Rusia



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan Dubes Rusia dan Kepala Majelis Rohaniah Muslimin se-Rusia. Foto: Yoga/nvi

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dan Kepala Majelis Rohaniah Para Muslimin se-Rusia Ulama Albir Kurganov. Dalam pertemuan tersebut, Dasco mengatakan pertemuan ini merupakan kunjungan silaturahmi untuk mempererat persahabatan dari kedua negara, Indonesia-Rusia.

“Ya tadi adalah pimpinan ulama di Rusia yang membawa rombongan ulama ulama dari berbagai negara di rusia tadi kunjungan silaturahmi untuk mempererat persahabatan,” ujar Dasco usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/6).

”

PERTEMUAN INI MERUPAKAN KUNJUNGAN SILATURAHMI UNTUK MEMPERERAT PERSAHABATAN DARI KEDUA NEGARA

Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut juga menyebut pertemuan tersebut juga menjadi sarana untuk saling bertukar informasi tentang ekonomi dan perdagangan antara Rusia dan Indonesia yang diharapkan dapat bisa berkembang dan dapat bekerja sama lebih baik ke depannya.

Sementara itu, ulama Albir Kurganov mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat selama berada di Indonesia. Ulama Albir menyebut bahwa pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang sangat penting untuk mengetahui pengalaman yang ada di Indonesia terutama di bidang Islam.

“Bagi kami adalah sangat penting untuk mengetahui mengenai pengalaman yang ada di Indonesia di bidang Islam dan sangat penting untuk berkenalan langsung dan bertemu langsung dengan saudara-saudara seiman kami di Indonesia,” ucapnya. Ulama Albir juga mengatakan, pertemuan ini juga membahas berbagai kemungkinan kerja sama antara Indonesia dan Rusia di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan potensi di bidang lainnya. ■ rdn/sf

Komisi II, Pemerintah, dan DPD Selesai Bahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan rasa syukurnya karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Selatan telah selesai dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

“Alhamdulillah kita tadi bisa selesai untuk RUU Papua Selatan dengan jumlah DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sebanyak 151. Lewat mekanismenya yang cukup baik,” ungkap Doli usai Rapat Kerja Panja RUU

Pembentukan Tiga Provinsi di Papua, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6) malam.

Dengan selesainya pembahasan RUU Papua Selatan ini, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, maka akan mempermudah pembahasan selanjutnya untuk RUU Papua Tengah

dan RUU Pegunungan. Karena materi ketiga RUU tersebut hampir sama. Dimana perbedaannya hanya pada batas cakupan wilayah masing-masing provinsi baru (pemekaran) yang akan dibentuk.

Tidak hanya itu, masih kata Doli, Komisi II DPR RI dan pemerintah beserta Komite I DPD RI juga sepakat RUU tentang Papua Tengah dan Papua Pegunungan itu mutatis mutandis dengan RUU Papua Selatan. Sehingga dapat langsung dibentuk Timus (Tim Perumus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi).

“Timus dan Timsin ini besok akan mulai bekerja menyelesaikan penyusunan tiga payung hukum pemekaran Papua itu sesuai dengan kesepakatan atau rumusan yang sudah kita diselesaikan malam ini,” pungkas Doli. Usai rapat kerja Panja RUU Pembentukan tiga Provinsi di Papua tersebut, Komisi II DPR RI juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, DPR Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP), guna menampung aspirasi terkait pembahasan RUU tersebut. ■ ayu/sf

”

**TIMUS DAN TIMSIN
INI BESOK AKAN
MULAI BEKERJA
MENYELESAIKAN
PENYUSUNAN TIGA
PAYUNG HUKUM
PEMEKARAN
PAPUA ITU**



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Raker Panja RUU Pembentukan Tiga Provinsi di Papua. Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi II DPR RI Ichsan Yunus mengatakan, Rancangan Undang-Undang Provinsi yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI adalah untuk memperkuat status hukum suatu daerah baik itu provinsi



Anggota Komisi II DPR RI Ichsan Yunus. Foto: Erman/nvl

RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

maupun kabupaten/kota. Sebagaimana diketahui alas hukum 20 provinsi dan 239 kabupaten/kota di Indonesia masih berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 atau UU Republik Indonesia Serikat (UU RIS).

Ichsan menyampaikan hal ini di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Komisi II DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/6).

“Karena UU Provinsi yang lama itu masih dalam turunan UU RIS. Maka inti, dari dibentuknya UU ini adalah demi ketertiban administrasi hukum. UU yang baru ini akan

mempermudah semua daerah apabila ada permasalahan hukum baik nasional maupun internasional,” tutur Ichsan.

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, Komisi II sudah menyepakati tidak akan banyak perubahan substansi dalam RUU Provinsi ini. “Jadi masalah tapal batas kita serahkan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Misal, tapal batas ke Kemendagri, kemudian masalah konten lokal dan kearifan lokal kita juga belum membahas itu sampai sekarang. Dana bagi hasil baik itu dari segala sisi yang berkaitan dengan daerah, kemudian politik sosial budaya, pertahanan dan keamanan itu belum kita bahas,” katanya. ■ es/aha

Legislator Berharap Unsur Kearifan Lokal Masuk dalam RUU Lima Provinsi

Anggota Komisi II DPR RI A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lima Provinsi yang tengah dibahas DPR RI dan pemerintah di dalamnya juga mengatur pengakuan karakteristik kearifan dan kebijakan lokal masing-masing provinsi.

“Selain kita memberikan alas hukum terhadap masing-masing provinsi, saya juga berharap agar di dalamnya juga dimasukkan hal-hal kekinian yang bisa berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memasukkan unsur kearifan lokal dan keunikan yang ada di provinsi tersebut,” papar Bagus dalam pertemuan Panja Provinsi Komisi II DPR RI dengan Sekda Provinsi NTB dan perwakilan Gubernur



Anggota Komisi II DPR RI A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra. Foto: Ayu/nvl

NTT, di Kantor Gubernur NTB, Lombok, Kamis (16/6).

Menurut politisi Partai Golkar ini, dengan memasukkan pengaturan unsur kearifan lokal dalam RUU tentang Lima Provinsi yang tengah dibahas ini, maka

akan jelas kehadiran pemerintah pusat dalam pelestarian kearifan lokal dan keunikan yang ada di masing-masing daerah atau provinsi.

Dengan kata lain, dengan memasukkan unsur kearifan lokal di dalam RUU Lima Provinsi tersebut menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah mengakui adanya Bhinneka tunggal Ika. “Terkait adanya kekhawatiran akan adanya pemekaran wilayah dalam proses pembahasan RUU Lima Provinsi itu suatu hal yang harus dikaji lebih dalam lagi. Namun jika pemekaran itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak dilakukan? Karena menurut saya, semua yang dilakukan intinya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ■ ayu/aha



Komisi III Dalami Potensi Rehabilitasi Penyalahguna di RUU Narkotika

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mendalami secara lebih komprehensif kriteria dan sarana untuk pemilahan atau klasifikasi yang tepat terhadap pemberian sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna, menurut saran berbagai pihak, yang telah memenuhi kriteria tertentu dapat dikategorikan sebagai pengguna murni dikenakan penjatuhan pidana berupa tindakan rehabilitasi sejalan dengan upaya restoratif.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dalam pertemuan dengan Kapolda Aceh Irjen. Pol. Ahmad Haydar, Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman,

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bachtiar, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh Brigjen. Pol. Heru Pranoto, dan Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Dr. M. Gaussyah, di Mapolda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (16/6).

“Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika justru meningkat. Maka, terdapat rencana arah kebijakan Anti-Narkotika yang bersumber dari masukan berbagai pihak antara lain klasifikasi yang tepat terhadap pemberian Sanksi Pidana bagi Penyalahguna. Penyalahguna yang telah memenuhi kriteria tertentu, yang dapat dikategorikan sebagai

pengguna murni, dikenakan penjatuhan pidana berupa tindakan rehabilitasi, sejalan dengan upaya restoratif,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut lebih lanjut.

Selain itu, sambung Pangeran, diperlukan mekanisme asesmen melalui sebuah Tim Asesmen Terpadu yang sinergis, harmonis, profesional, dan akuntabel serta bertujuan mengutamakan pendekatan rehabilitatif. “Maka mencermati hal tersebut perlu dilakukan pengkajian yang seksama dengan menerima masukan berbagai pihak khususnya di Aceh untuk semakin memperkaya ruang lingkup kajian maupun terhadap efektivitas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,” tandasnya.

Turut hadir Anggota Komisi III DPR RI Novri Ompusunggu, Safaruddin, I Wayan Sudirta (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Bambang Heri Purnama, Andi Rio Idris Padjalangi (Fraksi Partai Golongan Karya), H. Romo Muhammad Syafi'i, Muhammad Rahul (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya), Jacki Uly (Fraksi Partai Nasional Demokrat), Rano Al Fath (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), Didik Mukrianto (Fraksi Partai Demokrat), Nasir Djamil (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Nazaruddin Dek Gam (Fraksi Partai Amanat Nasional). ■ pun/aha



Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Aceh, Kepala BNNP Aceh, Kanwil Kemenkumham Aceh, dan akademisi Unsyiah. Foto: Puntho/nvl

Komisi III Target Sahkan RKHUP pada Masa Sidang V Tahun Persidangan 2021-2022

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan DPR menargetkan untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Masa Sidang V Tahun Persidangan 2021-2022. Bambang Pacul, sapaan akrabnya, menyatakan pemerintah sudah setuju agar RKUHP segera disahkan.

“Kita targetkan masa sidang ini RKUHP rampung. Tinggal nanti tata beracaranya kita buat lagi. Pemerintah sudah oke. Jadi itu nanti di Rapat Paripurna tingkat II diketok, selesai,” ujar Bambang Pacul dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Kamis (23/6).

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, RKHUP merupakan produk hukum terbaik yang dihasilkan oleh Komisi III DPR. Bambang Pacul menyebut RKUHP adalah *masterpiece* Komisi III. RKUHP adalah *masterpiece* Komisi III, tentu bukan Komisi III yang hari ini saja, tapi sudah dari dulu. Ini adalah buah kita yang luar biasa, tuturnya.

Bambang Pacul menyebut saat ini terdapat 14 isu di RKUHP yang dibahas. Namun, sambungnya, pembahasan tersebut sudah selesai dan tinggal disetujui. “Itu hanya tinggal 14 isu dan selesai. Ada 14 isu yang dalam kaitannya itu adalah isu yang hidup istilahnya *case life*, kasus hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hal inilah yang kita tarik untuk diberi hukum formal,” tandas Bambang Pacul.

Lebih lanjut, Bambang Pacul menambahkan DPR RI telah bersurat ke Presiden Jokowi untuk membawa RKUHP ke Rapat Paripurna. Namun, sejauh ini pemerintah belum memberikan surat jawaban karena perbedaan diksi yang perlu disepakati. Bambang Pacul juga memastikan RKUHP tidak akan menyengsarakan rakyat.

“Sudah saya pastikan apa yang diributkan masyarakat hari ini sebenarnya sudah tertampung sebelumnya.

Selain itu, KUHP dipastikan terbuka untuk publik. Saya meminta masyarakat untuk tidak khawatir. DPR telah bersurat ke Presiden namun belum dikirim balik ke DPR. Memang sempat ada perbedaan kata-kata, tapi ini sudah selesai,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Tengah IV tersebut. ■ pun/sf



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Jaka/mvl



Atasi PMK, Komisi IV Minta Segera Vaksinasi Hewan Ternak

sementara di PKH ada Rp80 miliar sudah diputuskan untuk beli vaksin, ungkap Sudin usai mengunjungi Pusat Veteriner Farma, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/6).

“Sementara vaksin belum ada, bantu dengan menyiapkan obat-obatan, antibiotik, vitamin dan disinfektan karena yang belum terkena PMK harus diberi vitamin agar tetap kuat, jangan sampai kena, yang kedua kandang harus disemprot disinfektan. Ini yang



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau Pusat Veteriner Farma di Jawa Timur. Foto: Singgih/rvt

Sejumlah hewan ternak di Jawa Timur yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) telah menembus angka ratusan hingga puluhan ribu ekor telah mati. Hal ini tentu menjadi perhatian serius oleh Komisi IV DPR RI yang merupakan salah satu bidang mitra kerjanya. Dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta agar pemberian vaksin terhadap hewan ternak agar dipercepat.

Untuk memenuhi kebutuhan vaksin terhadap hewan ternak, Sudin mendesak agar kementerian terkait melakukan *refocusing* anggaran atau menggunakan anggaran yang belum terpakai untuk pembelian vaksin hewan ternak, mengingat hewan ternak yang menjadi korban PMK telah mencapai puluhan dan tersebar luas.

“Uang yang belum terpakai gunakan dulu untuk pembelian vaksin, ada Rp100 miliar dari Eselon I untuk beli vaksin

paling penting,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Sudin sampaikan bahwa menurut informasi anggaran *refocusing* Rp100 miliar belum digunakan karena belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran. “Ayo kita sama-sama bicara dengan Dirjen Anggaran, supaya anggaran ini bisa cepat turun, karena kan memang Kementerian Pertanian terbatas anggarannya,” ujar Sudin. ■ skr/aha

Komisi IV Dorong Strategi Percepatan Vaksinasi PMK

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mendorong adanya percepatan pendistribusian vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai upaya pengendalian penyebaran PMK pada hewan ternak. Menurutnya, percepatan distribusi vaksin juga harus mengutamakan daerah prioritas yang terkena wabah yang sudah cukup parah.

“Komisi IV DPR RI meminta untuk ada strategi percepatan dalam proses vaksinasi PMK ini dan yang di prioritaskan kepada daerah daerah yang sudah terparah PMK ini,” kata



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI. Foto: Prima/nvl

Anggia saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bertemu Bupati Klaten beserta perwakilan mitra

kerja, *stakeholder*, di Klaten, Jawa Tengah, Kamis (16/6).

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI itu menambahkan, pihaknya melihat penyebaran virus yang terhitung cepat, sehingga vaksin dapat menjadi solusi konkret untuk menekan angka penyebaran wabah PMK. Untuk itu, Anggia bersama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI lainnya ingin vaksinator juga harus merupakan tenaga yang terampil guna mempercepat proses penyuntikan vaksin.

“Vaksinasi PMK ini merupakan salah satu jawaban agar kasus PMK tidak menyebar lebih luas lagi. Sudah akan datang vaksin PMK ke Indonesia sebanyak 800.000 (dosis). Yang 10.000 sudah dalam perjalanan ke Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya. Kita harus terus pantau pelaksanaan vaksinasi terhadap para ternak serta keterlibatan para vaksinator apakah mereka sudah terampil atau belum,” pesan politisi PKB tersebut. ■ pdt/sf

Komisi IV Tegaskan Harus Ada Perhatian Khusus pada Konservasi Penyu

Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mengatakan, konservasi sumber daya alam yang berada di Pantai Serangan terutama penyu sudah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Oleh karena itu, semua pihak harus memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan yang ada di lapangan, mengingat jika dibiarkan dan berjuang sendirian jelas tidak akan mampu.

“Kalau kami melihat tadi di lapangan masalah penyelamatan dan konservasi penyu memang kondisinya cukup memprihatinkan dari sisi pembiayaan, pemeliharaan kemudian juga dari sisi

bangunan dan gedung penangkaran penyu yang sudah mulai rapuh, ini perlu mendapatkan perhatian yang serius terutama dari kita Komisi IV DPR RI,” tegas I Made Urip usai meninjau *Turtle Conservation and Education Center* (TCEC) di Pantai Serangan, Kota Denpasar, Bali, Kamis (16/6).

Di sisi lain Made juga menilai, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung dari laut sudah cukup bagus. Dimana kerja konkret di lapangan perlu dilanjutkan, terutama masyarakat diberikan tentang pendidikan pelatihan bagaimana cara mengelola sumber laut yang baik yang dapat menghasilkan



Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip (kiri). Foto: Arief/nvl

produk-produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kami sudah lihat produk dari kelautan bisa digunakan untuk kebutuhan, ini memberikan kontribusi yang cukup bagus terhadap masyarakat pesisir, sesuatu yang berkaitan dengan penyelamatan ekonomi terutama dari sisi produk kelautan dan punya akses untuk lakukan ekspor dan memenuhi syarat dari sisi kualitas dan punya daya saing yang tinggi, saya kira Komisi IV DPR RI akan terus mendorong hal-hal semacam ini,” pungkasnya. ■ afr/aha

Komisi V Tinjau Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Sultra



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae (kiri) saat bertukar cenderamata dengan Gubernur Sultra usai memimpin Kunspek Komisi V DPR RI. Foto: Tiara/nvl

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI melakukan peninjauan terkait pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Sulawesi Tenggara, khususnya persiapan pembangunan Jembatan penghubung Pulau Buton-Pulau Muna dan Pulau Muna-Pulau Sulawesi. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menilai banyak persoalan terkait infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di Sultra yang penting untuk diselesaikan.

“Jalan nasional di terutama di Sultra ini banyak yang rusak sama halnya juga dengan jalan provinsi dan kabupaten. Kemudian terkait jembatan yang menghubungkan

Pulau Muna dan Buton kemudian Pulau Muna dan Sulawesi juga nantinya dibangun akan mempersatukan 81 Kabupaten di seluruh Sulawesi. Alhamdulillah dapat respon yang baik dari Kementerian PUPR dan sekarang dilakukan perencanaan-perencanaan dan studinya,” jelas Ridwan usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sultra, Sabtu (18/6).

Politisi dapil Sultra ini mengungkapkan nantinya dengan adanya jembatan penghubung Pulau Buton-Pulau Muna dan Pulau Muna-Pulau Sulawesi tentu akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sultra. “Hingga dapat mempercepat bergeraknya sektor ekonomi dan

sektor lainnya di Sultra. Rakyat kita akan bangkit ekonominya, tidak hanya itu pengusaha-pengusaha besar juga akan bangkit, yang pada akhirnya bisa menolong juga para pengusaha kecil maupun UMKM,” jelas Ridwan.

Oleh karenanya, Ridwan optimis seraya memberikan dukungan maksimal terkait pembangunan jembatan penghubung Pulau Buton-Pulau Muna dan Pulau Muna-Pulau Sulawesi yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Sultra tersebut. “Banyak potensinya kan kita memiliki aspal Buton, kita juga memiliki potensi pariwisata yang luas jangan lupa Wakatobi merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia dan adanya di Sultra,” ujar politisi Partai Golkar itu. ■ tra/aha

Pendangkalan Sungai Kawatuna, Komisi V Dorong Lakukan Pengerukan

Komisi V DPR RI melakukan peninjauan ke Sungai Kawatuna yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Sungai tersebut melintas di bawah *runway* Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu sehingga konstruksinya dibutuhkan *box cover* untuk mengalirkan air sungai itu. Pihak bandara sampai harus membuat *box cover* yang diharapkan dapat menormalkan aliran sungai.

“Karena kami melihat banyak sedimen-sedimen material yang ikut teralirkan di sungai ini, dikhawatirkan bahwa dari sisi *box cover* tersebut akan ada masalah apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu kami mengundang Kepala Balai Pengelola

Sungai agar bisa bersinergi dengan pihak bandara, bagaimana sedimen-sedimen ini segera dilakukan pengerukan dan dapat diatasi dengan baik,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat meninjau Sungai Kawatuna, di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/6).

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini menjelaskan terkait pendangkalan sungai adalah proses pengendapan material-material padat di bagian dasar sungai, fenomena ini umumnya disebabkan oleh penumpukan beberapa material alami seperti tanah, pasir atau lumpur, namun juga bisa disebabkan oleh hasil kegiatan manusia seperti pembuangan sampah ke sungai. ■ man/aha



Tim Kunspek Komisi V DPR RI saat meninjau Sungai Kawatuna. Foto: Andri/nvl

Komisi V Dorong Akses Jalan Bandara Syamsudin Noor Jadi Jalan Nasional

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha memimpin Kunjungan Kerja

Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan ini, Komisi V DPR RI mendorong agar pengerjaan akses jalan ke Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin dapat diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan menjadi jalan nasional.

Menurut Tamliha, dasar alasan akses jalan bandara dijadikan jalan nasional berdasar pada adanya kesepakatan

bersama tiga menteri yang bisa mengusulkan status jalan kabupaten/kota atau jalan provinsi menjadi jalan nasional.

“Keputusan DPR RI yang sudah disahkan terkait UU tentang jalan, tiga menteri sudah sepakat bisa mengusulkan jalan kabupaten atau kota dan jalan provinsi bisa ditangani pemerintah pusat,” papar Tamliha di Balai Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis, (16/6).

Anggota Dewan dari daerah pemilihan Kalsel ini mengatakan, pentingnya kejelasan status jalan akses



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha (kiri). Foto: Eko/nvl

ke bandara yang terletak di Banjarbaru, sehingga akan memudahkan penanganannya. Sementara selama ini belum ada kejelasan status jalan, apakah menjadi jalan nasional, jalan yang ditangani Pemprov Kalsel atau jalan kota setempat. ■ eko/aha

Transisi Energi Fossil ke EBT Masih Butuh Waktu

Transisi energi fosil yang selama ini masih dikonsumsi ke energi baru dan energi terbarukan (EBET) masih membutuhkan waktu panjang. Transisi ini kelak harus dilakukan bertahap, terarah, dan terukur, sambil menyiapkan sistem energi listrik nasional. Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengatakan, saat ini pihaknya sedang membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang di dalamnya membicarakan pula isu transisi energi fosil ke EBET. Sebelumnya, RUU ini sudah disetujui Rapat Paripurna DPR dan kini sedang diajukan ke pemerintah untuk selanjutnya dibahas bersama.

“Banyak sebenarnya yang menjadi poin krusial. Intinya adalah mendorong sektor energi nasional ke arah pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk kemandirian energi. Kita ingin adanya transisi yang terarah, bertahap, terukur, dan rasional, sambil tetap menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional,” jelas Diah secara eksklusif kepada *Parlementaria* saat diwawancara via Whatsapp, Kamis (23/6).

Dengan transisi energi ini, lanjut legislator dapil Jawa Barat II tersebut, bisa menjadi modal pembangunan berkelanjutan, mendukung perekonomian nasional, dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan

Anggota Komisi VII DPR RI
Diah Nurwitasari. Foto: Oj/nvl



Indonesia. Namun, transisi ini tidak mudah, mengingat harga EBET masih relatif mahal dibanding energi fosil. Selain itu, masih ujar Diah, energi

”

KITA INGIN ADANYA TRANSISI YANG TERARAH, BERTAHAP, TERUKUR, DAN RASIONAL, SAMBIL TETAP MENJAGA KESEIMBANGAN PASOKAN DAN KEBUTUHAN SERTA KESIAPAN SISTEM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

EBET melibatkan sistem yang besar dengan elemen yang beragam. Sekali lagi, perlu waktu dan sinergi yang baik untuk melakukan transisi ini.

“Kita ingin proporsi EBET menjadi lebih besar. Pembangkit EBET harus mulai masif dibangun. Dalam RUU ini ada pasal 7 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat yang menetapkan peta jalan pengembangan EBET. Target resmi kita yang sekarang adalah bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025. Ini tentu target yang ambisius yang ingin dicapai. Bahkan, ada klausul khusus, yaitu pasal 6 ayat (7) yang menyatakan bahwa seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik EBET paling lambat pada tahun 2024,” tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. ■ mh/sf

DPR Minta Petugas Haji Bekerja Lebih Ekstra



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: Rumi/nvi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan, DPR RI menjadikan kesehatan jemaah sebagai prioritas dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Mengingat penyelenggaraan haji kali ini di tengah transisi dari pandemi Covid-19 menjadi endemi.

“Yang paling utama adalah kesehatan jemaah haji Indonesia,” kata Diah dalam keterangan persnya yang diterima *Parlementaria*, baru-baru ini. Untuk itu, ia meminta Panitia Penyelenggara Haji (PPIH) khususnya bidang kesehatan haji 2022 bekerja lebih ekstra untuk memastikan keselamatan jemaah haji 2022. Hal ini, lanjut Diah untuk menghindari adanya jemaah haji meninggal dunia dalam menjalankan ibadah.

“Tim kesehatan harus lebih kerja ekstra dalam memonitor, memperhatikan dan menjaga kesehatan jemaah haji Indonesia,” kata politisi PDI-Perjuangan itu. Diah juga meminta tim kesehatan haji proaktif dalam

”

**TIM KESEHATAN
HAJI DIHARAPKAN
JUGA PROAKTIF
DALAM MEMBANGUN
KOMUNIKASI DAN
KERJA SAMA DENGAN
PARA PENDAMPING
HAJI MENYANGKUT
KESEHATAN JEMAAH.**

membangun komunikasi dan kerja sama dengan pendamping jemaah. Karena kesehatan jemaah haji adalah prioritas utama.

“Dalam prosesnya tim kesehatan haji diharapkan juga proaktif dalam membangun komunikasi dan kerja sama dengan para pendamping haji menyangkut kesehatan jemaah. Dan segera melaporkan penanganan kesehatan,” pesan legislator daerah pemilihan Jawa Barat III itu.

Sebelumnya, Jemaah Calon Haji (JCH) kloter pertama embarkasi Aceh bernama Abdul Wahab Salam (51 tahun), meninggal dunia dalam perjalanan ke Madinah, Arab Saudi. Berdasarkan informasi sementara, hasil pemeriksaan dokter almarhum didiagnosis meninggal karena penyakit Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). ■ rmm/sf

Waspada PMK, Gus Nabil Imbau Masyarakat Sembelih Hewan Kurban di RPH

Menjelang Iduladha 1443 H, Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan (RPH) dan tetap menjaga protokol kesehatan. Hal ini terkait dengan merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bagi hewan ternak termasuk sapi, kambing dan domba yang kerap dipilih sebagai hewan kurban di Indonesia saat momentum Hari Raya Kurban, selain itu juga karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Saya juga ingin mengimbau kepada masyarakat untuk bagaimana ketika di musim kurban ini untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, kemudian memotong hewan kurban itu juga bisa dilakukan di tempat-tempat yang relatif aman ya! Seperti tadi disampaikan oleh Pak Tulus (Ketua Harian YLKI) misalnya dipotong di RPH itu jauh lebih aman daripada dipotong di tempat-tempat seperti biasa,” ujar Gus Nabil saat menjadi narasumber dalam diskusi ‘Dialektika Demokrasi’ yang bertema “Jelang Iduladha 1443 H, Amankah Hewan Kurban di Tengah PMK?” di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Gus Nabil memahami secara budaya, kebiasaan, umumnya penyembelihan hewan kurban dilakukan di masjid dan mushola dengan lokasi yang biasanya berada disekitar pemukiman. Meski berbagai pihak telah menyatakan bahwa

tidak ada transmisi virus tersebut dari hewan ke manusia, namun Gus Nabil meminta masyarakat untuk tetap waspada. “Memang rasanya kurang afdal ya, kalau kemudian misalnya ada kurban kemudian tidak dipotong di masjid atau di musala. Memang memang ada perasaan, rasa tidak puas tapi ketika musim wabah seperti ini ya mencegah itu lebih baik,” tandasnya.

Meski dirasa tak mudah namun, politisi PDI-Perjuangan tersebut mengaku optimis jika hal tersebut dapat dilakukan terlebih jika pemerintah bisa mengambil ketegasan dan mau menggandeng ormas-ormas islam untuk menyosialisasikan hal tersebut. Menurutnya organisasi kemasyarakatan memiliki gerakan akar rumput yang kuat yang sebenarnya bisa diberi kepercayaan untuk menjadi perpanjangan tangan bagi pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan bahwa pemotongan hewan yang paling aman sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan. Hal tersebut dengan pertimbangan meminimalisir pergerakan hewan ternak sehingga memperkecil kemungkinan terinfeksi maupun menginfeksi. “Kalau menurut Undang-Undang Peternakan sebenarnya yang paling aman, baik pada kondisi wabah atau tidak itu (penyembelihan dilakukan) di RPH, rumah pemotongan hewan, apalagi dalam kondisi wabah hari ini,” katanya. ■ uc/sf

Anggota Komisi IX DPR
Muchamad Nabil Haroen.
Foto: Jaka/nvl



Perlu Sinergi Bersama Kenalkan Potensi Pariwisata Kabupaten Semarang

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menilai Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi alam yang luar biasa. Bahkan tidak kalah seperti Bali. Ia mengatakan, Kabupaten Semarang memiliki beragam kekayaan alam dan ekonomi kreatif yang layak untuk diapresiasi dunia. Melihat potensi ini, Agustina mendorong seluruh mitra kerjanya bersama Pemerintah Kabupaten Semarang bersama pihak terkait lainnya untuk dapat bersinergi

dalam menciptakan peluang pariwisata yang lebih menarik.

“Di sini ada danau, namun dalam sebutan Jawa adalah rawa, namanya Rawa Pening. Menariknya, di sini menawarkan Jetski sebagai prasarana

Rawa Pening. Kemudian ada kerajinan tangan juga. *Pas banget* buat ibu-ibu yang suka pernak-pernik, atau mau bikin tempat tisu, tas kecil, *clutches*, alas untuk tatakan panas, dan masih banyak lagi. Intinya semua barangnya rapih. Yang *enggak* kalah menarik, di sini juga menawarkan kopi. Kopinya tidak kalah menarik dengan kopi Gayo, Temanggung. Pokoknya enak *banget deh*,” tutur Agustina saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau potensi pariwisata di Bukit Cinta Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jateng, Jumat (17/6).

Sejauh ini, sarana dan prasarana sudah memadai, namun yang perlu dikembangkan adalah memperbanyak *event*. Hal ini guna mendorong wisatawan untuk datang ke Rawa Pening. “Menurut saya, *event* ini harus diperbanyak. Sejauh ini memang sudah dilakukan, tetapi hanya setahun sekali. Bahkan selama pandemi, 2 tahun tidak ada sama sekali. Saya berharap *stakeholder*-nya ikut *support*. Jadi selain *event* ‘Save Rawa Pening’ yang sudah dilakukan setahun sekali, berupa kegiatan membersihkan sampah dan eceng gondok ini, seharusnya ada perkenalan tari-tarian juga, ada pertunjukan, dan perbanyak kegiatan belanja ekonomi kreatif masyarakat setempat,” pungkas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Melihat potensi wisatawan Rawa Pening adalah pegiat lingkungan hidup dari seluruh dunia, Agustina berpendapat agar Pemkab Semarang mengambil kesempatan berharga ini. “Pemerintah Kabupaten haruslah menjadi koordinator, yaitu koordinator yang sekaligus mengajak *stakeholder* terkait untuk terjun langsung ke lapangan. Tadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Pak Wakil Bupati menyampaikan permohonan untuk dikawal pada APBN nantinya, yaitu untuk atraksi dan *amenity*. Hal ini kita dukung, supaya masyarakat dapat mengenal Rawa Pening sebagai destinasi wisata tujuan,” pungkas Agustina. ■ dip/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti.
Foto: Dipa/mvi

Komisi X: Pariwisata Kabupaten Malang Mulai Bangkit



Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki memimpin Kunspek Komisi X ke Kabupaten Malang. Foto: Devi/nvl

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Zainuddin Maliki menyampaikan, para pemangku kepentingan di sektor pariwisata perlu melakukan langkah-langkah yang mempunyai dampak positif demi membangkitkan kembali geliat dunia pariwisata Indonesia, termasuk pariwisata yang ada di Kabupaten Malang setelah melandainya pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, saat ini pariwisata di Kabupaten Malang kelihatan sudah ada perubahan. Dimana di kuartal pertama tahun 2022 ini hunian hotel sudah separuh atau 50 persen dari hunian pada tahun 2021. Dan dari segi kunjungan wisatanya juga kelihatan sudah lebih dari 50 persen

dari yang tercatat di tahun 2001. Ini menunjukkan ada kebangkitan pariwisata di Kabupaten Malang,” ungkap Zainuddin di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/6).

Dikatakannya, akibat pandemi Covid-19 lalu, kegiatan usaha di sektor pariwisata memang sangat terdampak. Namun selain itu ada juga masalah masalah lain yang dirasa perlu untuk mendapatkan perhatian, yaitu faktor koordinasi. Menurutnya harus ada kewenangan-kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Apalagi di Kabupaten Malang ini ada kawasan ekonomi khusus yang dikelola oleh pihak swasta.

“Kita tahu pemerintah memberikan *privilege* kepada Kawasan Ekonomi Khusus. Oleh karenanya Kawasan

Ekonomi Khusus ini jangan sampai setelah diberi *privilege* untuk pengembangan usaha tetapi kemudian tidak ada semangat dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut,” tuturnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyatakan, untuk lebih mengoptimalkan sektor pariwisata di Kabupaten Malang, Komisi X DPR RI akan mendorong pemerintah pusat melalui Kemenparekraf agar bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan atau

event yang mampu mendukung laju pertumbuhan bidang kepariwisataan. Selain itu juga melakukan kegiatan pendampingan serta konsultasi kepada desa-desa wisata yang memiliki semangat yang luar biasa.

“Masing-masing desa wisata itu semangat mengembangkan destinasi wisata di desanya. Hal ini perlu ditangkap oleh kementerian atau pemerintah pusat untuk mendorong even disetiap destinasi itu. Banyak produk-produk budaya yang diinformasikan kepada kita untuk bisa dikemas menjadi sebuah *event*. Kalau *event* kesenian lokal yang jumlahnya ratusan itu kemudian di festival kan, tentu ini akan menjadi suatu *event* yang mampu mendorong pengembangan destinasi wisata,” kata Zainuddin lebih lanjut. ■ *dep/aha*

Komisi XI Pertanyakan Pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia



Foto bersama Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia. Foto: Munchen/nvl

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, mempertanyakan pelaksanaan kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia (BI). Kebijakan makroprudensial sendiri ditetapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK),

serta mendukung stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Singkatnya kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.

Komisi XI DPR RI menilai langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi Indonesia sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada permasalahan yang masih harus dibenahi oleh Bank Indonesia, seperti daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi, "Langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia sudah cukup baik. Namun, kita

melihat *focusing* dan *zoom* beberapa daerah yang sampai hari ini masih sangat ekstrim kemiskinannya," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia, di Bogor, Jawa Barat (17/6).

Dalam kunjungan ini, Fathan juga menyampaikan informasi terkini mengenai adanya disparitas kesenjangan antar wilayah dalam pengimplementasian kebijakan makroprudensial ini, "Jadi, info *ter-update* yang kami dapatkan, bahwa ada disparitas kesenjangan antara Jawa Barat bagian selatan dengan Jawa Barat bagian utara. Tingkat pertumbuhan kredit Jawa Barat bagian selatan masih sangat rendah. Sebagai contoh pertumbuhan kredit Kota Bandung mencapai 13 persen, sedangkan Pangandaran hanya 0,8-0,9 persen," papar politisi PKB ini.

Berangkat dari permasalahan itu, Komisi XI DPR RI menyatakan interkoneksi merupakan kunci utama dalam penanganan masalah tersebut. Fathan juga mengimbau Bank Indonesia mulai mendorong sektor-sektor produktif. "Kata kuncinya satu, *interconnecting*. Fasilitasi agar pertumbuhan, kredit untuk UMKM, dan sektor lainnya bisa dialokasikan untuk Jawa Barat bagian selatan. Kami juga merekomendasikan Bank Indonesia, mulai menggenjot sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," imbau Fathan lebih lanjut.

Melalui kunjungan ini, Komisi XI DPR RI berharap Bank Indonesia dapat terus bekerja dengan baik, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional bisa tercapai. "Saya kira dengan kunspek ini Bank Indonesia terus bekerja dengan baik, akselerasi pertumbuhan ekonomi, *concern* pada UMKM. Agar ke depannya Jawa Barat menjadi sektor pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan baik," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II tersebut. ■ *mcn/sf*

Insentif Pajak UMKM Perlu Dioptimalkan Guna Dorong Pertumbuhan Ekonomi Banten

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menilai sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus senantiasa diberikan insentif perpajakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Provinsi Banten. Sebab, menurutnya, UMKM telah berjasa besar dalam menjadi tonggak perekonomian baik di level nasional maupun lokal.

“Ini yang kita dorong terus agar insentif pajak ini tidak hanya diberikan kepada industri-industri besar,” ujar Marinus saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor

Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, di Kantor Penerimaan Pajak dan Bea Cukai (KPPBC), Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jumat (17/6).

Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Banten hanya berada di peringkat delapan sebagai provinsi terkaya di Indonesia berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2021. Karena itu, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini meminta agar perusahaan-perusahaan yang rutin membayar pajak ke pemerintah pusat, jangan sampai malah *feedback* berupa peningkatan

kesejahteraannya malah diterima masyarakat lain.

“Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Terutama di dapil saya di (kawasan) Tangerang utara. Masih banyak masyarakat yang miskin dan belum bisa menerima manfaat dari pajak-pajak kepada negara yang diperoleh pemerintah,”

ujar wakil rakyat dari dapil Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ini. ■ rdn/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea
Foto: Ridwan/nvl

Komisi XI Lakukan Pengawasan Intermediasi Perbankan di Jawa Barat



Anggota Komisi XI DPR RI Jeffry Romdonny.
Foto: Aaron/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Jeffry Romdonny mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

pada triwulan pertama tahun 2022 Indonesia berada dalam kondisi normal, dengan kinerja intermediasi yang terus meningkat dengan tingkat kehati-hatian atau prudensial di lembaga jasa keuangan yang terjaga. Penyaluran kredit perbankan nasional tumbuh sebesar 6,67 persen (year of year) pada triwulan pertama tahun 2022 atau lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan kredit pada Desember 2021 yang sebesar 5,24 persen (yoy).

Demikian disampaikan Jeffry saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Pengawas Perbankan, Deputi Komisiner Pengawas Perbankan III OJK, Kepala ojk Regional 2 Provinsi

Jawa Barat, Direktur Humas OJK, perwakilan Bank Mandiri, perwakilan BNI Bandung, perwakilan BRI Jawa Barat, perwakilan BTN, serta Direksi Bank Jabar Banten, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/6). Pertemuan ini dalam rangka melakukan pengawasan intermediasi perbankan.

“Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan program dan kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan sumber ekonomi baru, meningkatkan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan di daerah,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut. ■ ron/sf

BAKN DPR Konsultasi ke BPK Terkait Penelaahan Cukai Hasil Tembakau



Foto bersama Pimpinan dan Anggota BPK RI dengan Pimpinan BPK RI. Foto: Oji/rvl

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan rapat konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penelaahan cukai hasil tembakau. Konsultasi ini terkait dengan hasil pemeriksaan BPK Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang hasil cukai tembakau dari tahun 2016, 2019, hingga tahun 2020.

“Nah, kita melihat dari sudut pandang BPK seperti apa, sejauh apa, dan saran perbaikannya seperti apa. Diharapkan nanti saran dan masukan dari BPK itu sinkron dengan apa yang kami temukan di lapangan, dan nanti bisa dilanjutkan dengan Kemenkeu,” ujar Ketua BAKN DPR RI Wahyu

Sanjaya saat rapat konsultasi di Gedung BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/6).

Konsultasi ini adalah tindak lanjut setelah BAKN DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke beberapa perusahaan rokok untuk mendengar

”

BPK MENEMUKAN BAHWA ADA PERBEDAAN ANTARA STOK MATERIAL TEMBAKAU DENGAN JUMLAH PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI CUKAI.

masukan terkait pengelolaan cukai, bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Di antara beberapa perusahaan rokok yang dikunjungi tersebut adalah PT Gudang Garam di Pasuruan, Jawa Timur; PT Pura Barutama, hingga PT Djarum, di Kudus, Jawa Tengah.

Menurut Wahyu, BPK menemukan bahwa ada perbedaan antara stok material tembakau dengan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai. “Jadi, misalnya, kalau kita punya satu kilogram tembakau

itu bisa berapa batang (rokok). Tetapi, setelah kita jumlahkan penerimaan cukainya lebih rendah. Jadi, (yang tercatat) produksinya lebih rendah dari yang sewajarnya,” tambah Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.

Di sisi lain, berdasarkan peninjauannya, para pengusaha rokok turut mengeluhkan tingginya tarif cukai yang selalu naik. Namun, di saat tarif cukai naik, produksi rokoknya menurun, tapi keuntungan perusahaannya bertambah atau tetap. “Berarti kan ada anomali. Harusnya kan saat tarif cukai naik, produksi turun, keuntungan perusahaan juga turun. Tetapi, ini kan sebaliknya. Tarif cukai naik, produksi turun, harga rokok naik. Kira-kira seperti itu,” tambah Wahyu. ■ rdn/sf

Ketua dan Wakil Ketua Pengurus dan Pengawas Koperasi Setjen DPR Periode 2022-2026 Terpilih Secara Aklamasi



Foto bersama Pimpinan Pengurus dan Pengawas Koperasi Setjen DPR RI terpilih. Foto: Bonis/nvl

Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI memilih Ketua dan Wakil Ketua Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI periode tahun 2022-2026. Pemilihan ini dilakukan oleh anggota koperasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6). Sebelumnya, para calon kandidat yang terdiri dari 3 pasang calon Ketua dan Wakil Ketua pengurus serta 3 pasang calon Ketua dan Wakil Ketua pengawas menyampaikan programnya serta melakukan debat pada Selasa (21/6), di Gedung Nusantara III, Senayan.

Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Koperasi terpilih secara aklamasi untuk periode tahun 2022-2026

adalah pasangan nomor urut 2 yakni Hippi Hidupati dan Sam Karya Nugraha dengan perolehan suara sebanyak 145 suara. Pasangan lainnya yakni Najib Ibrahim dan Dedy Bagus Prakasa memperoleh suara sebanyak 57 serta pasangan Timbang Supriyanto dan Vega Lavlinesia memperoleh suara sebanyak 49 suara. Jumlah total kertas suara adalah sebanyak 253 dengan 2 kertas suara rusak.

Hippi mengatakan ia dan wakil ketua pengurus akan melanjutkan dan menjalankan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai DPR RI. “Yang pertama tentunya akan kami selesaikan dulu masalah-masalah yang ada di internal, pembenahan

internal. Yang kedua itu tentunya sesuai dengan tuntutan anggota saya harus mengembangkan berbagai usaha yang sebenarnya sangat potensial dulu di dalam saja. Di dalam sangat potensial baru nanti setelah kira-kira sudah settle bener, bisa kita keluar (dari lingkungan DPR RI). Usaha dengan kerja sama dengan pihak lain,” katanya.

Selanjutnya, untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi terpilih untuk periode tahun 2022-2026 adalah pasangan nomor urut 1 yakni Rudy Rochmansyah dan Budi

Janika dengan perolehan suara sebanyak 145 suara. Pasangan lainnya yakni Indra Pahlevi dan Endang Suryastuti mendapat perolehan suara sebanyak 51 suara serta Chairil Patria dan Dwi Frihatomo memperoleh suara sebanyak 57 suara. Jumlah total kertas suara yakni 253 kertas suara.

Pasangan Rudi dan Budi yang terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI ini merasa bangga, bahagia, dan bersyukur serta mengagap kemenangan mereka ini merupakan kemenangan semua anggota Koperasi. “Jadi bukan kemenangan orang per orang tetapi kemenangan kolektif. Karena tujuannya adalah kita ingin memajukan koperasi agar lebih sejahtera untuk anggotanya,” ungkap Rudi yang diamini Rudi. ■ ga/sf



Foto bersama Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI usai Diskusi Pendahuluan P20. Foto: Agung/rvl

BKSAP: P20 Momentum Perkuat Kolaborasi Parlemen Untuk Hadapi Tantangan di Masa Depan

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI merupakan motor parlemen Indonesia dalam melaksanakan diplomasi dengan parlemen di seluruh dunia. Maka dari itu, menurut Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, momentum P20 dengan Indonesia sebagai tuan rumah akan memperkuat jalinan kolaborasi parlemen-parlemen di negara G20 tersebut dalam menghadapi tantangan dunia di masa depan.

“Sehingga diplomasi parlemen ini terus menjalin koordinasi, kolaborasi, komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka memberi dukungan penuh kepada pemerintah Indonesia, ini jadi kunci keberhasilan kepemimpinan Indonesia di G20,” ujar Fadli saat membuka Diskusi Pendahuluan P20: Menuju Pertemuan Ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20 (P20), di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/6).

Lebih lanjut Fadli memaparkan bahwa kepemimpinan Indonesia di G20

juga merupakan satu momentum yang berharga untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar serta prospektif. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah populasi penduduk nomor empat terbesar di dunia dan punya potensi ekonomi yang juga sangat besar.

“Oleh karena itu kepemimpinan kita diuji. Tidak sekedar menunjukkan kapasitas di level global namun juga seharusnya bisa menjadi refleksi cita-cita Luhur konstitusi kita yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial,” urai politisi Partai Gerindra itu.

Dalam kesempatan yang sama, bertindak sebagai moderator diskusi, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan pertemuan Forum Ketua Parlemen Negara G20 atau P20 nanti merupakan momentum bersama untuk menyelesaikan tantangan global. “DPR RI punya peran strategis dalam keketuaan Indonesia di G20. P20 merupakan momentum bersama parlemen negara-negara G20 untuk mencari solusi menyelesaikan tantangan global,” kata politisi Partai Demokrat tersebut. ■aha

BURT Dorong Pelayanan dan Fasilitas RS di Batam Bersaing dengan Negara Tetangga



Wakil Ketua BURT DPR RI A. Bakri HM saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Awal Bros Batam. Foto: Aisyah/mvl

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau fasilitas Rumah Sakit Awal Bros Batam sebagai rumah sakit *provider* dari PT Asuransi Jasindo yang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Usai melaksanakan peninjauan, Wakil Ketua BURT DPR RI A. Bakri HM menekankan bahwa pelayanan dan fasilitas yang baik juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Pelayanan dan fasilitas rumah sakit bukan hanya bagi pejabat negara atau pejabat daerah, tetapi di kalangan masyarakat yang umum pun juga perlu diperhatikan. Karena kita

tahu pelayanan rumah sakit ini sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka yang tidak mampu,” tutur Bakri saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Awal Bros Batam, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (18/6).

Di sisi lain, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengapresiasi kinerja RS Awal Bros Batam dalam hal pelayanan yang diberikan kepada Anggota DPR RI beserta keluarganya. Pelayanan yang baik ini sangat penting, mengingat tugas yang diemban dan dijalankan Anggota Dewan sangatlah besar.

Bakri berharap RS lain yang bermitra dengan BURT maupun PT Asuransi Jasindo dapat mengambil contoh yang baik dari RS Awal

Bros Batam dalam segi pelayanan dan fasilitas. Tidak hanya itu, Bakri juga mendorong pelayanan dan fasilitas RS di Batam dapat bersaing dengan negara tetangga, mengingat banyaknya masyarakat yang membutuhkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik.

“Perlu saya sampaikan bahwa di daerah-daerah yang ada di sekitar Kepulauan Riau ataupun Sumatera ini banyak masyarakat yang selalu berobat keluar, baik itu Singapura maupun Malaysia. Saya pengin kita putar, dari Singapura dan Malaysia ini bagaimana mereka bisa berobat ke Indonesia khususnya daerah-daerah yang berbatasan dengan mereka,” tandas legislator dapil Jambi itu. ■ ais/sf

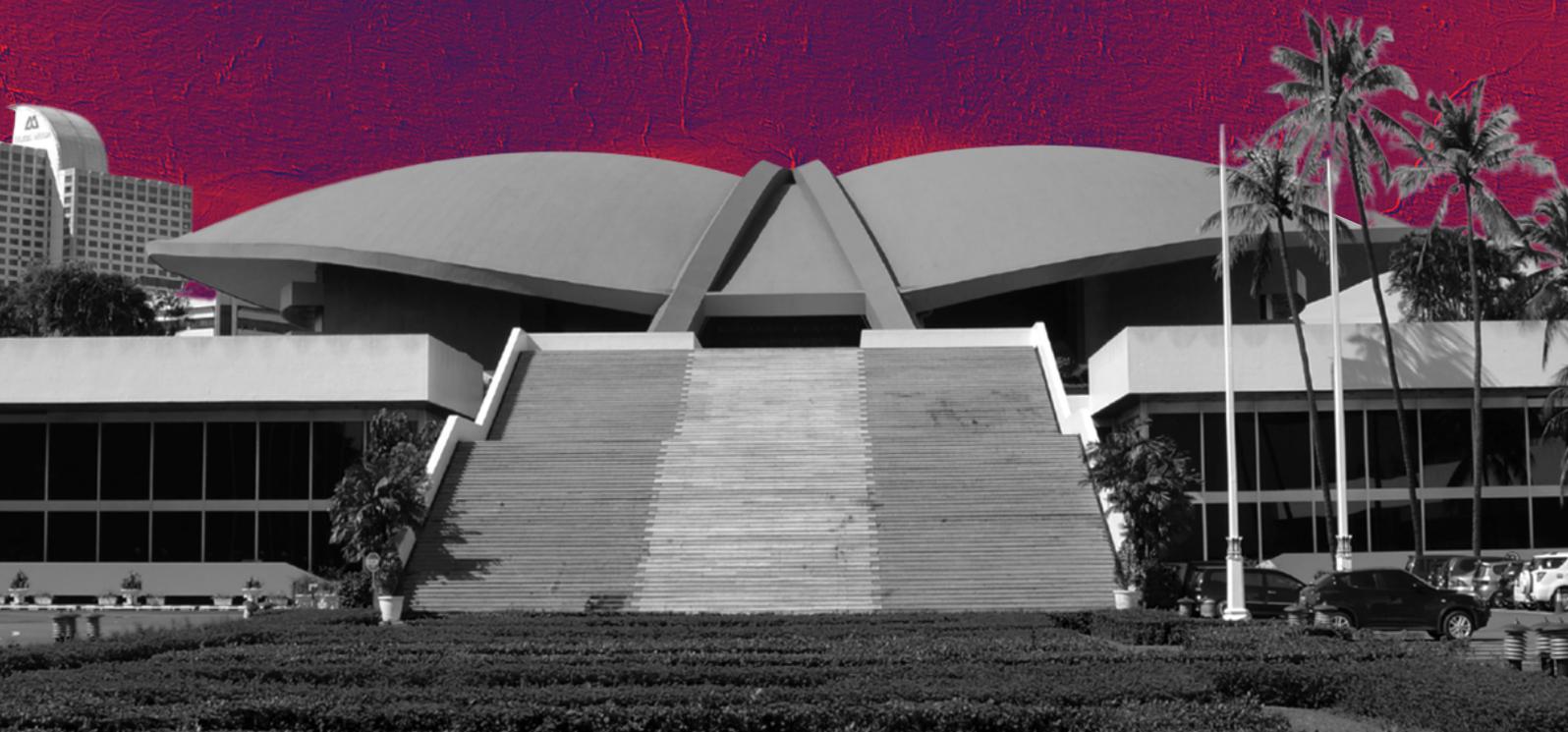


ROAD TO THE 8TH G20

PARLIAMENTARY SPEAKERS' SUMMIT (P20)

6-7 October 2022 | Jakarta, Indonesia

“Stronger Parliaments for Sustainable Recovery”



@DPR_RI



DPR RI